



IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM TRANS BANTEN

Adelia Agustiani^{1*}, Andhilka Pratama², Rara Fesri Wandira³, Arif Permana Putra⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Administrasi Pajak, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Corresponding Author: adelyaane@gmail.com*

Abstract: Pancasila is the ideology and philosophy of the Indonesian nation that guides the way of life of the nation and state. Actualizing its values is crucial to addressing the challenges of the times and moral degradation. One form of implementation is through public policy. The Banten Provincial Government, which has a high tax revenue ratio, has launched a new public transportation program called Trans Banten, funded by the regional budget (APBD). This program was initiated as an application of Pancasila values, particularly the second, fourth, and fifth principles, with the aim of providing a safer, more comfortable, integrated, and equitable transportation system. However, the introduction of Trans Banten has generated both pros and cons, particularly opposition from local public transportation drivers who have experienced a decline in income. This phenomenon demonstrates the dynamic between the need for transportation modernization and social justice for those operating in the old system. Therefore, this study aims to analyze how Pancasila values are applied in the management of the Trans Banten program and assess its impact on community welfare.

Keywords: Pancasila Values, Tax Management, Public Services, Trans Banten, Social Justice.

Abstrak: Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memandu tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi nilai-nilainya menjadi penting untuk menghadapi tantangan zaman dan degradasi moral. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui kebijakan publik. Pemerintah Provinsi Banten, yang memiliki rasio penerimaan pajak tinggi, telah meluncurkan program transportasi publik baru bernama Trans Banten yang didanai oleh APBD. Program ini diinisiasi sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, keempat, dan kelima, dengan tujuan menghadirkan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, terintegrasi, dan berkeadilan. Namun, kehadiran Trans Banten menimbulkan pro dan kontra, terutama penolakan dari sopir angkot lokal yang mengalami penurunan pendapatan. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika antara kebutuhan modernisasi transportasi dan keadilan sosial bagi pelaku sistem lama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam pengelolaan program Trans Banten dan menilai seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Kata Kunci: Nilai Pancasila, Pengelolaan Pajak, Pelayanan Publik, Trans Banten, Keadilan Sosial.

Article info: Accepted

Recommended citation: APA Style v.7

How to Cite:

Agustiani, A., Pratama, A., Wandira, R. F., & Putra, A. P. (2026). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan pajak dan pelayanan publik melalui Program Trans Banten. *Pancasila and Civics Education Journal*, 5(1). 19-28

<https://doi.org/10.30596/pcej.v5i1.27809>



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

INTRODUCTION

Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki fondasi negara berupa Pancasila. Dasar dari negara Indonesia dapat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945, yang menyatakan, "Kemerdekaan sejatinya adalah hak semua bangsa, sehingga penjajahan di muka bumi harus dihilangkan karena tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan." Tambahan pula, dalam pasal 1 ayat (3) dari UUD 1945, Pancasila secara resmi diakui sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila mengandung arti sebagai fondasi negara yang mengelola dan menentukan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan dari negara Indonesia. Berdasarkan pendapat Ir. Soekarno, Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia yang telah diteruskan selama ratusan tahun, meskipun tersimpan dan tidak terdengar karena pengaruh budaya Barat. Jadi, Pancasila bukan sekadar filosofi negara, tetapi juga mencerminkan filosofi seluruh bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan negara serta sebagai pengarah dalam kehidupan sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu, ada keterikatan erat antara Pancasila dan ideologi. Ideologi itu sendiri berhubungan dengan tujuan dan aspirasi, meliputi kumpulan gagasan atau pemikiran manusia mengenai politik, ajaran, doktrin, serta nilai-nilai dalam masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan (Hasan, 2002:212).

Indonesia yang merupakan rumah bagi beraneka ragam suku, kebudayaan, agama, dan tradisi dapat disatukan kembali melalui nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, ideologi yang dianut oleh masyarakat Indonesia tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Siapapun yang menolak atau melawan Pancasila akan langsung menghadapi kekuatan keseluruhan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, pemahaman atas arti dan makna Pancasila dapat memudahkan kita untuk mengerti konteks permasalahan yang tengah dihadapi oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan ideologi dan nilai-nilai fundamental bangsa.

Untuk meningkatkan taraf hidup, pemahaman, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial, kenegaraan, dan kebangsaan, diperlukan penyempurnaan dalam sistem pendidikan moral Pancasila. Pancasila harus diadopsi sebagai cara pandang hidup masyarakat Indonesia, sebagai dasar filsafat bangsa dan negara, prinsip persatuan, identitas bangsa, serta landasan ideologi negara. Hal ini perlu dilakukan melalui jalur pendidikan dasar nasional dengan pengintegrasian ke dalam kurikulum pembelajaran wajib di sekolah serta perguruan tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa dengan memiliki kemampuan untuk memahami, menghayati, dan menerapkan Pancasila, generasi muda akan memiliki etika dan moral yang baik. Dengan demikian, implementasi Pancasila dalam membangun etika kenegaraan dapat terealisasi, memungkinkan bangsa Indonesia menjadi lebih beriman, beradab, religius, tangguh, dapat dipercaya, dan harmonis (KB-BERKAH).

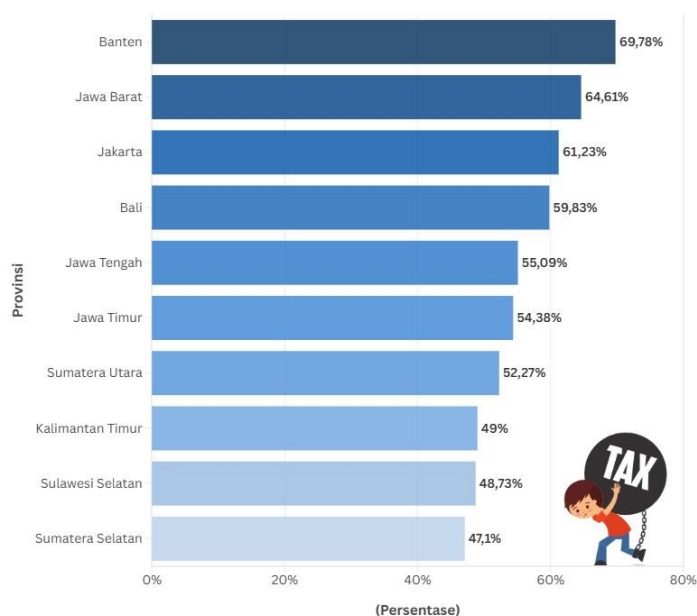
Saat ini, penerapan Pancasila telah menjadi hal yang tak terhindarkan bagi seluruh anggota masyarakat. Di zaman sekarang, kemajuan teknologi berlangsung sangat pesat dan mengandung berbagai nilai, sehingga timbul isu-isu mengenai globalisasi yang memperkenalkan nilai-nilai baru terkait pola hidup dan tatanan dunia. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menerapkan Pancasila sangat diperlukan agar masyarakat tidak mengalami kemunduran moral dan tetap menjaga nilai-nilai tinggi yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Damanhuri et al., 2016, diungkapkan bahwa Pancasila memiliki peranan penting sebagai acuan bagi warga negara untuk bertindak baik dalam kehidupan sosial, yang sering kali diartikan sebagai warga negara yang baik. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam interaksi sosial, kenegaraan, dan kebangsaan, diharapkan individu dapat mengerti pola pikir dan sikap yang sejalan dengan ideologi bangsa. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kehidupan yang konstruktif serta tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Menurut Alim & Al, 2011, penerapan Pancasila dapat dicapai dengan meningkatkan semangat cinta tanah air yang kuat, seperti

kecintaan terhadap produk lokal. Selain itu, nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dan diimplementasikan dengan baik. Prinsip-prinsip agama juga harus disemai dan diterapkan dengan seksama.

Banten adalah salah satu provinsi yang berada di Indonesia dengan 4 kabupaten dan 4 kota. Provinsi ini termasuk dalam deretan provinsi yang memiliki tingkat penerimaan pajak yang tinggi berdasarkan data tahun 2023, dengan kontribusi utamanya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

10 Provinsi dengan Rasio Penerimaan Pajak Tertinggi di Indonesia

(2023)



Sumber: DJPK-Kemenkeu diolah BPS

GoodStats

Banten menjadi provinsi terdepan dalam hal rasio pendapatan pajak, mencapai 69,78%. Ini mengindikasikan bahwa Banten memiliki perekonomian yang kokoh, yang didorong oleh adanya kawasan industri besar seperti Cilegon dan Tangerang. Jawa Barat berada di posisi kedua dengan rasio pendapatan pajak mencapai 64,61%. Daerah ini memiliki jumlah penduduk yang besar dan sektor industri yang pesat, menjadikannya salah satu region dengan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak. Di Jawa Barat juga terdapat banyak kawasan industri, termasuk Bekasi, Karawang, dan Bandung. Jakarta menempati urutan ketiga dengan rasio pendapatan pajak sebesar 61,23%. Sebagai pusat ekonomi dan bisnis Indonesia, Jakarta adalah lokasi berbagai aktivitas yang memberikan sumbangan pajak yang cukup signifikan. Banyak perusahaan besar dan kantor pusat perusahaan multinasional beroperasi di Jakarta, menjadikannya sumber utama pendapatan pajak. Bali berada di tempat keempat dengan rasio penerimaan pajak sebesar 59,83%. Sebagai destinasi wisata terkenal di dunia, sektor pariwisata di Bali menghasilkan pendapatan pajak yang sangat besar. Di posisi kelima terdapat Jawa Tengah dengan rasio penerimaan pajak 55,09%, sementara Jawa Timur berada di urutan keenam dengan rasio 54,38%. Sumatera Utara adalah provinsi yang terletak di luar Pulau Jawa dan Bali dengan rasio penerimaan pajak tertinggi, yaitu 52,27% pada tahun 2023. Kalimantan Timur, yang kaya akan sumber daya alam, memiliki rasio penerimaan pajak sebesar 49%. Sulawesi Selatan berada di peringkat kesembilan dengan rasio

48,73%. Kota Makassar, sebagai pusat ekonomi di wilayah timur Indonesia, memainkan peran penting dalam kontribusi penerimaan pajak provinsi itu. Sumatera Selatan menempati posisi terakhir di antara sepuluh provinsi teratas dengan rasio penerimaan pajak sebesar 47,1%.

Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi memiliki proporsi penerimaan pajak yang lebih besar. Elemen seperti keberadaan sektor industri, perdagangan, dan jasa memainkan peranan penting dalam menentukan kontribusi pajak suatu wilayah. Hasil kinerja APBN Provinsi Banten hingga 31 Mei 2024 memperlihatkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Peningkatan ini tercermin dari pertumbuhan yang positif dalam pendapatan dan belanja negara yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Informasi ini disampaikan oleh para pemimpin unit Kementerian Keuangan Satu Regional Banten, termasuk Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Suska, Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil DJP Banten, Aria Bimantoro Kusuma D, Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, serta Plh Kepala Kanwil DJKN Banten, Sugiwanto, melalui konferensi pers yang diadakan secara virtual menggunakan Microsoft Teams Meeting. Suska menjelaskan bahwa pencapaian pendapatan APBN di Banten hingga 31 Mei 2024 sangat memuaskan. Penerimaan pajak telah mencapai 41,91% dari target yang ditetapkan, penerimaan dari bea dan cukai mencapai 37,39% dari yang direncanakan, dan penerimaan PNPB mencapai 66,90% dari target. Secara keseluruhan, total pendapatan sampai tanggal 31 Mei 2024 telah mencapai 41,49% dari target yang diharapkan, dengan pertumbuhan sebesar 12,86% dibandingkan tahun sebelumnya.

Provinsi Banten saat ini telah meluncurkan inisiatif baru yang dikenal sebagai Trans Banten. Inisiatif ini merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk menyediakan sistem transportasi umum yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi, serta memberikan keadilan bagi pengelola transportasi konvensional. Pemerintah Provinsi Banten berkolaborasi dengan Perum DAMRI untuk menjalankan dua unit bus Trans Banten di koridor 3. Kerja sama ini dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember 2025, dengan total anggaran sebesar Rp 390 juta. Dana yang dipergunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten.

Provinsi Banten saat ini memiliki program baru yang dinamakan Trans Banten. Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberikan sistem transportasi umum yang lebih aman, nyaman, dan terpadu, serta adil bagi pengemudi angkot dan pengusaha transportasi tradisional. Pemerintah Provinsi Banten bekerja sama dengan Perum DAMRI untuk mengoperasikan dua bus Trans Banten pada koridor 3. Kerja sama ini berlangsung selama tiga bulan, mulai bulan Oktober hingga Desember 2025, dengan anggaran sebesar Rp 390 juta. Dana tersebut berasal dari APBD Provinsi Banten sendiri.

Program Trans Banten yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Banten merupakan implementasi konkret nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sila kedua, keempat, dan kelima. Keberadaan program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan sistem transportasi umum, namun juga menggambarkan semangat kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam masyarakat. Meski begitu, kehadirannya tidak lepas dari berbagai pendapat pro dan kontra di lapangan. Sejak awal operasionalnya, layanan ini ditolak oleh beberapa sopir angkot di jalur Palima-Cinangka. Mereka berpendapat bahwa kehadiran bus ini mengakibatkan penurunan jumlah penumpang dan berimbas pada berkurangnya pendapatan harian mereka.

Keadaan ini mencerminkan dinamika yang seringkali terjadi dalam proses pembangunan: di satu sisi ada kebutuhan untuk mendatangkan transportasi yang lebih modern dan teratur, sementara di sisi lain ada kekhawatiran dari masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sistem yang lama. Fenomena ini menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut, terutama terkait

dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat dan bagaimana kebijakan publik dapat berlangsung seimbang antara inovasi dan keadilan sosial. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam pengelolaan program Trans Banten saat ini? (2) Seberapa besar dampak dari adanya Trans Banten terhadap kesejahteraan masyarakat? Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam penyelenggaraan layanan transportasi umum Trans Banten, baik dari aspek kebijakan, pelayanan, maupun interaksi antara petugas dan penumpang. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk menilai dampak dari adanya Trans Banten terhadap kesejahteraan masyarakat.

METHODS

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan fokus analisis terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam operasional layanan transportasi umum Trans Banten. Dengan pendekatan deskriptif, studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendetail mengenai fenomena pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam program Trans Banten, termasuk dalam aspek kebijakan, pelayanan, interaksi antara petugas dan penumpang, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi makna, konsep, dan konteks yang berkembang dalam berbagai sumber literatur (Creswell, 2014). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara, observasi lapangan kepada masyarakat kota Serang sebagai pengguna layanan Trans Banten. Analisis ini bertujuan memahami cara nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam program Trans Banten serta dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat.

RESULT AND DISCUSSION

A. Implementasi Nilai Pancasila dalam Layanan Trans Banten

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pengguna dan dua petugas DAMRI Trans Banten, ditemukan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila tampak dalam aspek kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial, terutama pada sila kedua, keempat, dan kelima. 1) Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Nilai kemanusiaan tercermin dari perilaku sopan santun para petugas terhadap penumpang, seperti membantu lansia naik turun bus, menjaga kebersihan, terdapat bangku prioritas yang dikhususkan untuk para lansia, wanita hamil, serta masyarakat penyandang disabilitas dan memastikan keamanan pengguna. Dari hasil observasi, petugas berupaya menjaga kenyamanan dan memperlakukan semua penumpang secara adil tanpa memandang latar belakang sosial mereka. 2) Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan Perum DAMRI menjalin kerja sama dalam pengelolaan program ini melalui dialog kebijakan publik. Upaya menyesuaikan jadwal bus agar tidak mengganggu trayek angkutan lokal merupakan bentuk nyata nilai musyawarah dan demokrasi yang diutamakan untuk keseimbangan kepentingan masyarakat. 3) Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Program Trans Banten memberikan akses transportasi publik yang terjangkau bagi semua kalangan. Secara keseluruhan, program Trans Banten dinilai berhasil menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam operasionalnya, terutama dalam memberikan keadilan sosial melalui transportasi yang terjangkau.

Trans Banten merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang aman, terjangkau, dan nyaman bagi masyarakat. Dalam praktiknya, penyelenggaraan layanan ini memerlukan proses pengelolaan yang terus-menerus, mulai dari pengaturan rute, perawatan armada, hingga pengawasan operasional harian. Pengoperasian layanan ini memberikan perubahan yang cukup signifikan bagi aktivitas sehari-hari warga, terutama dalam hal aksesibilitas menuju tempat kerja, kampus, maupun pusat pelayanan publik. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan ini, muncul berbagai dampak yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Keberadaan Trans Banten memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat, di antaranya; a) Biaya transportasi lebih terjangkau, sehingga membantu meringankan pengeluaran harian Masyarakat; b) Kenyamanan dan keamanan perjalanan meningkat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas tanpa harus menghadapi risiko dari transportasi pribadi atau kendaraan illegal; c) Menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya:

1. Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): pelayanan diberikan dengan sikap yang menghormati dan memperlakukan semua penumpang secara manusiawi.
2. Sila ke-4 (Kerakyatan): masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan terkait layanan, sehingga pengambilan keputusan lebih partisipatif.
3. Sila ke-5 (Keadilan Sosial): tarif yang terjangkau dan akses pelayanan yang merata mencerminkan upaya mewujudkan keadilan mobilitas bagi seluruh warga.
4. Penggunaan Dana APBD dalam Mensubsidi Trans Banten.
5. Biaya transportasi lebih terjangkau.

Biaya transportasi yang lebih terjangkau menjadi salah satu dampak positif paling dirasakan masyarakat sejak hadirnya layanan Trans Banten. Sebelum ada Trans Banten, banyak warga harus menggunakan ojek, angkot, atau transportasi online dengan biaya yang relatif lebih tinggi, terutama bagi pekerja yang bepergian setiap hari. Tarif Trans Banten yang telah disubsidi melalui APBD membantu masyarakat mendapatkan akses mobilitas yang murah dan stabil tanpa khawatir lonjakan harga. Hadirnya tarif yang terjangkau ini memberikan keringanan bagi warga dengan pengeluaran transportasi harian yang cukup besar. Selain itu, akses ke berbagai rute yang dilayani Trans Banten membuat masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang lebih efisien dan ekonomis. Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara dengan salah satu pengguna Trans Banten. Ia menyampaikan bahwa layanan tersebut sangat membantu karena memberikan kenyamanan dan biaya perjalanan yang lebih ringan. Dalam wawancara, ia mengatakan:

“Saya setiap hari naik Trans Banten, dan kalau suatu saat layanan ini tidak gratis dan harus bayar pun saya tetap bersedia. Fasilitasnya nyaman, ada AC, tempat duduk, nggak panas-panasan, dan aman buat mahasiswa yang rumahnya jauh. Asal tarifnya masih wajar, saya tetap mau.” (Sumber: wawancara pengguna trans banten).

Pengguna tersebut juga menegaskan bahwa layanan gratis yang disubsidi APBD memang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari pernyataannya: *“Layak banget sih Kak, soalnya sudah membantu banyak orang, bukan cuma mahasiswa. Tadinya cuma bisa ngandelin angkot yang jalannya lama, atau ojek online yang mahal. Sekarang ada Trans Banten yang terjangkau dan nyaman. Jadi layak kalau dapat dana dari APBD.”* (Sumber: wawancara pengguna trans banten).

Ia juga menyatakan bahwa penggunaan pajak untuk subsidi Trans Banten merupakan hal yang wajar karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat: *“Wajar aja sih Kak, karena tujuan uang pajak kan buat fasilitas umum dan ini manfaatnya dirasain semua orang.”* (Sumber: wawancara pengguna trans banten).

Trans Banten memberikan dampak positif berupa biaya transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Dengan subsidi APBD, warga dapat bepergian dengan tarif murah dan fasilitas yang nyaman. Hal ini dibenarkan oleh salah satu pengguna yang menyatakan bahwa ia tetap bersedia membayar jika layanan tidak lagi gratis, karena manfaatnya nyata, membantu mobilitas banyak orang, dan penggunaan pajak untuk subsidi dianggap wajar sebagai fasilitas umum.

6. Kenyamanan dan Keamanan Perjalanan Meningkatkan

Kenyamanan dan keamanan perjalanan meningkat sejak hadirnya Trans Banten. Fasilitas bus yang dilengkapi AC, tempat duduk yang memadai, serta kondisi kendaraan yang terawat membuat masyarakat dapat bepergian dengan lebih nyaman dan tenang. Dengan perjalanan yang stabil dan rute yang jelas, warga tidak perlu lagi menghadapi risiko dari penggunaan transportasi pribadi atau kendaraan ilegal yang sering menimbulkan ketidakpastian, kelelahan, maupun potensi bahaya di jalan. Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara dengan salah satu pengguna Trans Banten. Ia menjelaskan bahwa fasilitas yang tersedia membuat perjalanan jauh lebih nyaman dibandingkan moda transportasi lain. Dalam wawancara, ia menyatakan: *“Fasilitasnya nyaman, ada AC, tempat duduk, nggak panas-panasan dan aman buat mahasiswa yang rumahnya jauh.”* (Sumber: wawancara pengguna trans banten).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keamanan dan kenyamanan selama perjalanan menjadi faktor utama yang dirasakan pengguna setiap hari. Selain itu, responden juga membandingkan Trans Banten dengan angkot dan ojek online yang sebelumnya menjadi pilihan utama. Ia menyebut bahwa angkot berjalan lebih lama dan ojek online memiliki biaya yang tinggi, sehingga Trans Banten menjadi alternatif yang lebih nyaman, aman, dan teratur. Dengan demikian, layanan ini memberikan rasa aman yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa harus menghadapi risiko dari moda transportasi lain.

7. Menerapkan Nilai-nilai Pancasila

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam layanan Trans Banten terlihat dari bagaimana pemerintah menyediakan transportasi yang adil, manusiawi, dan bermanfaat bagi seluruh warga. Kehadiran layanan ini membantu masyarakat, khususnya yang tinggal jauh atau memiliki mobilitas tinggi, untuk mendapatkan akses transportasi yang layak dan mudah dijangkau. Hal ini sejalan dengan Sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena layanan diberikan dengan memperhatikan kenyamanan, beban ekonomi, dan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu pengguna Trans Banten. Ia menjelaskan bahwa layanan ini sangat membantu karena mampu meringankan pengeluaran hariannya. Dalam wawancara, ia menyampaikan: *“Layanan gratisnya itu layak untuk kita, apalagi rumah saya lumayan jauh... jadi saya terbantu banget sama Trans Banten ini karena bisa membantu meringankan beban pengeluaran saya selama kuliah.”* (Sumber: wawancara pengguna trans banten).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa layanan Trans Banten bukan hanya sekadar transportasi, tetapi juga bentuk perlakuan yang manusiawi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, nilai Sila ke-4, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, tercermin dari partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan layanan. Responden bersedia memberikan pendapat terkait kebijakan tarif, dan menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika suatu saat Trans Banten berbayar.

8. Penggunaan Dana APBD dalam mensubsidi Trans Banten

Penggunaan dana APBD untuk mensubsidi layanan Trans Banten dinilai sebagai langkah yang tepat dalam mendukung pemerataan akses transportasi publik. Subsidi ini membantu

masyarakat, terutama mahasiswa dan pekerja, untuk mendapatkan layanan transportasi yang aman, teratur, dan terjangkau. Kehadiran subsidi memungkinkan Trans Banten beroperasi dengan kualitas layanan yang baik tanpa membebani masyarakat dengan tarif yang tinggi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang menilai bahwa penggunaan pajak untuk mendukung layanan Trans Banten sudah sesuai dengan tujuan dana publik. Dalam wawancara, ia menyatakan: *“Menurut saya tepat sih. Karena membantu masyarakat yang ada di kota Serang.”* (Sumber: wawancara pramudi dan pramusapa trans banten).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa subsidi APBD dinilai memberikan dampak langsung bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dari sisi biaya transportasi. Namun, narasumber juga mengungkapkan bahwa keberadaan Trans Banten memberikan dampak bagi transportasi swasta, khususnya angkutan umum yang merasa tersaingi. Ia menyebutkan bahwa: *“Paling dari dampak negatifnya dari swasta... ada yang merasa tersaingi dan berpikir dengan adanya transbanten ini mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh setiap harinya... yang memicu adanya demo dari pihak swasta.”* (Sumber: wawancara pramudi dan pramusapa trans banten). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaan APBD untuk subsidi dianggap tepat, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketegangan dengan pelaku transportasi swasta. Ketika ditanya mengenai solusi yang dapat dilakukan untuk meredam masalah tersebut, narasumber menyarankan.

B. Dampak Program Trans Banten terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dari hasil observasi dan wawancara, terdapat dampak sosial dan ekonomi yang cukup signifikan yang ditimbulkan oleh Trans Banten.:

1. Dampak Ekonomi

Pemanfaatan APBD untuk operasional layanan Trans Banten berhasil menekan biaya transportasi bagi mahasiswa dan pekerja. Hal ini sejalan dengan pernyataan seorang pramusapa dalam wawancara yang menyatakan, *“Menurut saya tepat. Karena membantu mahasiswa serta para pekerja yang ada di wilayah Kota Serang dan sekitarnya.”* Selain itu, layanan ini juga berkontribusi pada peningkatan mobilitas ekonomi. Namun, perlu diperhatikan bahwa para sopir angkot lokal melaporkan adanya penurunan pendapatan sejak beroperasinya program Trans Banten. Kondisi ini mengindikasikan perlunya kebijakan kompensasi atau integrasi trayek yang terencana agar tidak menciptakan ketimpangan ekonomi. Melalui musyawarah yang telah dilakukan antara Dinas Perhubungan dan Pendemo yaitu sopir angkutan lokal telah dicapai kesepakatan berupa penyesuaian jam operasional dari Trans Banten yang disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Dampak Sosial

Program Trans Banten memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat merasakan adanya peningkatan kenyamanan, keamanan, dan kebersamaan dalam menggunakan transportasi publik. Layanan ini menciptakan suasana yang lebih tertib dan ramah di antara pengguna, di mana terjadi interaksi sosial yang menggambarkan nilai-nilai saling menghargai, toleransi, serta gotong royong selama perjalanan. Selain itu, implementasi nilai-nilai Pancasila juga terlihat nyata dalam aspek kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Secara keseluruhan, kehadiran Trans Banten tidak hanya memperbaiki sistem transportasi publik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial antarwarga. Program ini berhasil menumbuhkan rasa saling menghormati, semangat gotong royong, dan kesadaran bersama dalam menjaga ketertiban serta

kebersihan di lingkungan transportasi umum. Dengan demikian, Trans Banten menjadi salah satu contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat modern.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil integrasi literatur, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pendidikan Bela Negara pada Era *Society 5.0* memiliki peran strategis dalam memperkuat kesadaran nasionalisme mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan Bela Negara tidak lagi dipahami hanya dalam konteks pertahanan militer, tetapi juga melalui kontribusi non-fisik di ruang sosial dan digital yang diwujudkan dengan aktivitas penyebaran konten kebangsaan, peningkatan literasi digital, serta upaya menangkal penyebaran *hoax* dan radikalisme. Selain bertujuan membentuk mahasiswa yang memiliki kecerdasan teknologi, pendekatan pendidikan ini juga berfokus pada penguatan karakter, internalisasi nilai Pancasila, serta pemahaman akan tanggung jawab moral dalam menjaga keutuhan NKRI. Pembelajaran yang dirancang secara kontekstual, partisipatif, dan memanfaatkan teknologi modern mampu membuat nilai Bela Negara lebih mudah diterima dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, Pendidikan Bela Negara merupakan elemen penting dalam membangun ketahanan ideologis mahasiswa agar mampu menghadapi berbagai tantangan ketahanan ideologis mahasiswa agar mampu menghadapi berbagai tantangan global dan tetap menjunjung tinggi persatuan serta martabat bangsa di era digital.

REFERENCES

- Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan media sosial bagi pengembangan pemasaran UMKM (Studi deskriptif kualitatif pada distro di Kota Surakarta).
- Alam Amri Muhammad, I. Muhammad, M. Udaya, 2023, Strategi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten.
- Ali Hasbi, Hadi K. I, 2020, Edukasi Perpajakan Melalui Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Anggara, A. P. 2023, Meski Diprotes, Bus Trans Banten Tetap Beroperasi.
- Anggriyani Made Ni, 2025, Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila.
- Caroline, V., & Afriadi, F. (2025). Analisis Tren Perbandingan Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pendapatan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
- Darmayasa Nyoman, 2019, Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Pada Perspektif Akuntansi Pancasila.
- Darmayasa Nyoman I, 2022, Perwujudan Amnesti Pajak Humanistik Religius Berkeadilan.
- Dwiyani, O. R., & Nurhastuti. (2023). Studi kuantitatif deskriptif kualitas hidup ibu yang memiliki anak cerebral palsy di Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy Padang.
- Harsa, M. R., Falevi, M. R., Aqna, M. A., Raihan, M., Ramdhan, M., Bunga, N. F., Hanifah, N., Qotrunnada.

- N., Kartini, N., & Herdiana, D. (2022). Aktualisasi nilai-nilai sila ke 5 Pancasila melalui kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat.
- Johan Arvie, Hikmah F., Anditya A., 2019, Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila.
- Kusnadi, E., Marzan, A., Taufik, I., & Budjiwati, K. (2024). Pengaruh Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten.
- Novitasari, S., & Najicha, F. U. (2023). Pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- Nurkhalisa, M., & Dewi, D. A. (2022). Reaktualisasi nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa di tengah era globalisasi.
- Piwari, B., & Sutabri, T. (2025). Analisis dampak Metaverse Sosial terhadap interaksi masyarakat di era digital menggunakan metode kualitatif deskriptif.
- Ramadhani, R., Nurhangesti, M., Maulida Nasiha, S. S., Purwaningsih, A., Zaidan, M., Arifah, N. R., & Alfin, E. (2025). Dampak Aktivitas TPA Terhadap Lingkungan.
- Rosidin, A. (2025). Strategi Pemerintah Provinsi Banten dalam Mengoptimalkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025.
- Sudrajat Ajat, O.P. Arles, 2015, Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan.
- Zulkarnain, R. 2025, Implementasi Nilai Pancasila dalam Pajak Sistem Pengelolaan Transportasi.